

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

**DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
YANG DIDUGA TERLIBAT KKN
Bulan 19..... (2)**

(3)

[illegible]

..... 19.....
Kepala Kantor,

(4)

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
YANG DIDUGA TERLIBAT KKN
(Lampiran 1)**

1. Angka (1) : Diisi dengan nama KPP, Karikpa, atau Kantor Wilayah DJP yang melakukan inventarisasi.
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) : - Kolom (1) Cukup jelas.
- Kolom (2) Cukup jelas.
- Kolom (3) Diisi dengan alamat yang jelas sesuai dengan informasi yang diterima
- Kolom (4) Diisi dengan sumber informasi.
- Kolom (5) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan dari unit kerja yang bersangkutan (KPP. Karikpa atau Kantor Wilayah DJP).

Lampiran 2
SE Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Se-10/PJ.7/1998
Tanggal : Agustus 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SATGAS TINGKAT KANTOR WILAYAH (1)

**DAFTAR NOMINATIF HASIL INVENTARISASI
WAJIB PAJAK YANG DIDUGA TERLIBAT KKN**
Kantor Pelayanan Pajak (2)
Bulan 19..... (3)

(4)

[illegible]

..... 19.....
Kepala Kantor,

(5)

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF HASIL INVENTARISASI
WAJIB PAJAK YANG DIDUGA TERLIBAT KKN
(Lampiran 2)**

1. Angka (1) : Cukup jelas.
2. Angka (2) : Cukup jelas.
3. Angka (3) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
4. Angka (4) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Cukup jelas.
 - Kolom (3) Diisi dengan alamat yang jelas sesuai dengan informasi yang diterima
 - Kolom (4) Diisi dengan sumber informasi.
 - Kolom (5) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
5. Angka (5) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan **Ketua Satgas** yang bersangkutan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

DAFTAR NOMINATIF HASIL IDENTIFIKASI
WAJIB PAJAK YANG DIDUGA TERLIBAT KKN
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	Nama dan Alamat WP	Hasil Identifikasi						Keterangan
		NPWP	Tingkat Kepatuhan WP	Tahun Pajak terakhir yang diperiksa berdasarkan LP2	Tindakan Penagihan Pajak yang terakhir			
					No. dan Tanggal SKP/STP	Tunggakan Pajak (Rp)	Tahap dan Tanggal Tindakan Penagihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

....., 19.....
Kepala Kantor,

(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF HASIL IDENTIFIKASI
WAJIB PAJAK YANG DIDUGA TERLIBAT KKN
(Lampiran 3)**

1. Angka (1) : Diisi dengan nama KPP yang melakukan identifikasi.
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Cukup jelas.
 - Kolom (3) Diisi dengan NPWP yang bersangkutan atau dalam hal belum ber-NPWP diisi dengan '**belum**'.
 - Kolom (4) Diisi sesuai dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut penilaian KPP bersangkutan berdasarkan data administrasi perpajakan yang tersedia yaitu diisi dengan '**Tinggi**' dalam hal kepatuhan Wajib Pajak cukup baik, atau diisi dengan '**Rendah**' dalam hal kepatuhan Wajib Pajak kurang baik.
 - Kolom (5) Diisi dengan **tahun pajak yang terakhir** diperiksa berdasarkan **LP2**.
 - Kolom (6) Diisi dengan nomor dan tanggal SKP/STP **yang belum** dibayar lunas.
 - Kolom (7) Diisi dengan jumlah tunggakan pajak untuk masing-masing SKP/STP.
 - Kolom (8) Diisi dengan tahap dan tanggal tindakan penagihan pajak terakhir yang sudah dilaksanakan, misalnya : Surat Paksa pada tanggal 14 Agustus 1998.
 - Kolom (9) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan serta cap jabatan Kepala KPP yang bersangkutan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SATGAS TINGKAT KANTOR WILAYAH (1)

DAFTAR NOMINATIF TINGKAT LANJUT
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	Nama dan Alamat WP	Hasil Identifikasi			Tingkat Lanjut		Keterangan
		NPWP	Tingkat Kepatuhan WP	Tahun Pajak terakhir yang diperiksa berdasarkan LP2	Usul Pemeriksaan/ Penyidikan Pajak	Penagihan Pajak Berupa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., 19.....
Kepala Kantor,

(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF TINDAK LANJUT
(Lampiran 4)**

1. Angka (1) : Cukup jelas.
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Cukup jelas.
 - Kolom (3) Diisi dengan NPWP yang bersangkutan atau dalam hal belum ber-NPWP diisi dengan '**belum**'.
 - Kolom (4) Diisi sesuai dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan hasil identifikasi menurut Daftar Nominatif Hasil Identifikasi yang diterima dari KPP.
 - Kolom (5) Diisi dengan **tahun pajak yang terakhir** diperiksa berdasarkan LP2 sesuai dengan hasil identifikasi menurut Daftar Nominatif Hasil Identifikasi yang diterima dari KPP.
 - Kolom (6) Diisi dengan usul pemeriksaan atau penyidikan beserta tahun pajaknya sesuai dengan pertimbangan **Ketua Satgas**.
 - Kolom (7) Diisi dengan tahap tindakan penagihan pajak yang akan dilaksanakan oleh KPP terkait sesuai dengan pertimbangan Ketua Satgas.
 - Kolom (8) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu, misalnya :
 - a. Dalam hal bentuk tindak lanjut berupa pemeriksaan pajak dan pemeriksaannya diusulkan untuk dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP, maka kolom ini diisi dengan **TG. DJP-BPKP**.
 - b. Dalam hal bentuk tindak lanjut adalah berupa penagihan pajak, maka kolom ini diisi dengan nama KPP yang akan melakukan tindakan penagihan pajak.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan **Ketua Satgas** yang bersangkutan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

DAFTAR NOMINATIF HASIL PENAGIHAN PAJAK
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	Nama WP	Alamat WP	NPWP	No. dan Tanggal SKP/STP	Tunggakan Pajak (Rp)	Tahap Tindakan Penagihan	Jumlah hasil penagihan pajak (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

..... 19.....
Kepala Kantor,

(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF HASIL PENAGIHAN PAJAK
(Lampiran 5)**

1. Angka (1) : Cukup jelas
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penagihan aktif dalam bulan laporan bersangkutan.
 - Kolom (3) Cukup jelas.
 - Kolom (4) Cukup jelas.
 - Kolom (5) Cukup jelas.
 - Kolom (6) Diisi dengan jumlah pajak terutang sesuai dengan SKP/STP **dikurangi** dengan jumlah pajak yang **telah** dibayar.
 - Kolom (7) Diisi dengan tahap tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan sampai dengan bulan laporan.
 - Kolom (8) Diisi dengan jumlah utang pajak yang dibayar setelah tindakan penagihan aktif dilaksanakan sampai dengan bulan laporan.
 - Kolom (9) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan serta cap jabatan Kepala KPP yang bersangkutan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SATGAS TINGKAT KANTOR WILAYAH (1)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	KPP	Inventarisasi			Identifikasi			Tindak Lanjut			Ket
		Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (3+4)	Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (6+7)	Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (9+10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

....., 19.....
Kepala Kantor,
(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS
(Lampiran 6)**

1. Angka (1) : Cukup jelas
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Cukup jelas.
 - Kolom (3) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil inventarisasi sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (4) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil inventarisasi bulan ini.
 - Kolom (5) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil inventarisasi sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (6) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil identifikasi sampai bulan lalu
 - Kolom (7) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil identifikasi bulan ini
 - Kolom (8) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak hasil identifikasi sampai bulan ini.
 - Kolom (9) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang diusulkan untuk ditindaklanjuti baik berupa pemeriksaan, penyidikan maupun penagihan pajak sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (10) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang diusulkan untuk ditindaklanjuti baik berupa pemeriksaan, penyidikan maupun penagihan pajak bulan ini.
 - Kolom (11) Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang diusulkan untuk ditindaklanjuti baik berupa pemeriksaan, penyidikan maupun penagihan pajak sampai dengan bulan ini.
 - Kolom (12) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan **Ketua Satgas** yang bersangkutan.

Catatan :

- Sumber data dari :
 - Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Wajib Pajak yang diduga terlibat KKN (Lampiran 2)
 - Daftar Nominatif Hasil Identifikasi Wajib Pajak yang diduga terlibat KKN (Lampiran 3)
 - Daftar Nominatif Tingklanjut (Lampiran 4).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SATGAS TINGKAT KANTOR WILAYAH (1)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	Bentuk Tindak Lanjut	Persetujuan Tindak Lanjut			Persetujuan Tindak Lanjut			Hasil Tindak Lanjut (Rp)			Ket
		Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (3+4)	Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (6+7)	Sampai dengan Bulan Lalu	Bulan ini	Sampai dengan Bulan ini (9+10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pemeriksaan Pajak oleh :										
	a. Tim Pemeriksa Khusus										
	b. Tim Gab DJP-BPKP										
2.	Penyidikan Pajak										
3.	Penagihan Pajak										

Catatan:

*) Rincian hasil tindak lanjut penagihan pajak bulan ini terlampir.

..... 19.....
Kepala Kantor,

(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
(Lampiran 7)**

1. Angka (1) : Cukup jelas
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Cukup jelas.
 - Kolom (3)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah LP2 yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah surat Instruksi Penyidikan Pajak yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan hasil penjumlahan jumlah Wajib Pajak sesuai dengan Kolom (7) Daftar Nominatif Tindak Lanjut (Lampiran 4) sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (4)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah LP2 yang telah diterbitkan Dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah surat Instruksi Penyidikan Pajak yang telah diterbitkan dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah Wajib Pajak sesuai dengan jumlah pada Kolom (7) Daftar Nominatif Tindak Lanjut (Lampiran 4) untuk bulan ini.
 - Kolom (5)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah LP2 yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah surat Instruksi Penyidikan Pajak yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah Wajib Pajak sesuai dengan jumlah pada Kolom (7) Daftar Nominatif Tindak Lanjut (Lampiran 4) sampai dengan bulan ini.
 - Kolom (6)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pemeriksaan (LPP) yang telah diselesaikan sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah penyidikan (Wajib Pajak) yang telah diselesaikan sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang telah dilakukan penagihan aktif sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (7)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pemeriksaan (LPP) yang telah diselesaikan dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah penyidikan (Wajib Pajak) yang telah diselesaikan dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang telah dilakukan penagihan aktif dalam bulan ini.
 - Kolom (8)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pemeriksaan (LPP) yang telah diselesaikan sampai bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah penyidikan (Wajib Pajak) yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang telah Dilakukan penagihan aktif sampai dengan bulan ini.
 - Kolom (9)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk seluruh Wajib Pajak yang telah selesai diperiksa sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan hasil penyidikan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan lalu.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah tunggakan pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan hasil penagihan aktif sampai dengan bulan lalu.
 - Kolom (10)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk seluruh Wajib Pajak yang telah selesai diperiksa dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan hasil penyidikan yang telah diselesaikan dalam bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah tunggakan pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan hasil penagihan aktif dalam bulan ini dengan rincian sesuai **Daftar Nominatif Pencairan Tunggakan Pajak** terlampir (**Lampiran 6.1**).
 - Kolom (11)
 - Nomor Urut 1 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk seluruh Wajib Pajak yang telah selesai diperiksa sampai dengan bulan ini.
 - Nomor Urut 2 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan hasil penyidikan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini.
 - Nomor Urut 3 : diisi dengan jumlah tunggakan pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan hasil penagihan aktif sampai dengan bulan ini.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan **Ketua Satgas** yang bersangkutan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SATGAS TINGKAT KANTOR WILAYAH (1)

DAFTAR NOMINATIF HASIL PENAGIHAN PAJAK
Bulan 19..... (2)

(3)

No. Urut	Nama WP	Alamat WP	NPWP	No. dan Tanggal SKP/STP	Tunggakan Pajak (Rp)	Tahap Tindakan Penagihan	Jumlah hasil penagihan pajak (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

....., 19.....
Kepala Kantor,

(4)

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF HASIL PENAGIHAN PAJAK
(Lampiran 7.1)**

Daftar nominatif ini dibuat berdasarkan hasil kompilasi data dari Daftar Nominatif Hasil Penagihan Pajak **(Lampiran 5)** yang diterima dari KPP.

1. Angka (1) : Cukup jelas
2. Angka (2) : Diisi dengan nama bulan laporan yang bersangkutan.
3. Angka (3) :
 - Kolom (1) Cukup jelas.
 - Kolom (2) Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penagihan aktif dalam bulan laporan bersangkutan.
 - Kolom (3) Cukup jelas.
 - Kolom (4) Cukup jelas.
 - Kolom (5) Cukup jelas.
 - Kolom (6) Diisi dengan jumlah pajak terutang sesuai dengan SKP/STP **dikurangi** dengan jumlah pajak yang **telah** dibayar.
 - Kolom (7) Diisi dengan tahap tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan sampai dengan bulan laporan.
 - Kolom (8) Diisi dengan jumlah utang pajak yang dibayar setelah tindakan penagihan aktif dilaksanakan sampai dengan bulan laporan.
 - Kolom (9) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP, tandatangan serta cap jabatan Kepala KPP yang bersangkutan.